

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN  
SASARAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS PUBLIK, EVALUASI  
ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH  
DAERAH (SKPD KABUPATEN KAMPAR)**

**Oleh:**

**Ning Umbar Susilowati**

**Pembimbing: Andreas dan Devi Safitri**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

e-mail: [ningumbarsusilowati@gmail.com](mailto:ningumbarsusilowati@gmail.com)

*The Effect Of Budgeting Participation, Budget Goal Clarity, Public  
Accountability, and Budget Evaluation On Performance Of  
Local Government Officials (SKPD Kampar District)*

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of budgeting participation, budget goal clarity, public accountability, and budget evaluation on performance of local government officials (SKPD Kampar District). Respondents of this study are the government officials who work in kampar district. A totals of 128 questionnaire were distributed to the respondents and 116 questionnaire were returned for analysis. Data analysis method is using multiple linear regression. The result revealed that budgeting participation, budget goal clarity, public accountability, and budget evaluation has influence on performance of local government officials.*

*Keywords: budgeting participation, budget goal clarity, public accountability, budget evaluation, and performance officials*

**PENDAHULUAN**

Kinerja aparat pemerintahan yang baik sudah lama menjadi mimpi warga Indonesia. Kendati pemahaman tentang kinerja aparat pemerintahan ini berbeda-beda, namun sebagian besar membayangkan bahwa dengan sistem pemerintahan yang baik, warga Indonesia ingin memiliki kinerja dan kualitas pemerintahan yang baik. Banyak yang membayangkan bahwa dengan memiliki praktik ini yang lebih baik, maka kualitas pelayanan

publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintahan menjadi semakin peduli terhadap kepentingan warga (Yuda, 2012). Kinerja aparat pemerintah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Hanim, 2014). Ukuran kinerja aparat pemerintah sendiri dapat dilihat dari ketetapan waktu dari penyusunan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran dan

hasil dari proyek yang telah dilaksanakan oleh aparat pembuat dan pelaksana anggaran (Irfan, 2013). Kinerja aparat pemerintah juga dinilai dari bagaimana anggota – anggota dalam sektor pemerintahan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di organisasinya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Pada era otonomi daerah saat ini, masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD berdasarkan dengan prestasi kerja yang dicapai dengan membangun sistem anggaran yang memadukan perencanaan kinerja dan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana dan hasil yang diharapkan yang disebut dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

Anggaran Berbasis Kinerja yang dimaksud dalam penyusunan RKA-SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Untuk dapat menyusun anggaran Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan anggaran berbasis kinerja (ABK) diperlukan pegawai yang mempunyai kemampuan analisis kinerja program. Tentu saja hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran untuk menyediakan sumber daya manusia yang memadai, agar

dapat mengelola anggaran secara ekonomis, efisien, efektif dan yang benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan azas-azas pelayanan publik yang didalamnya meliputi transparansi, akuntabel, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban. (Nuriani, 2014).

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Anggaran pada Kabupaten Kampar memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi Kabupaten Kampar. Selain itu kinerja aparat pemerintah juga merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu dalam mencapai suatu target.

Berdasarkan siaran pers, penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten Kampar tahun anggaran 2011 sampai 2013, terdapat penyimpangan penggunaan anggaran sebesar Rp 198 miliar. Ditemukannya kasus penyimpangan APBD oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau ini terkait dengan pengadaan delapan item proyek yang dilakukan oleh para pejabat Kabupaten Kampar. Kejati mengendus adanya tindak korupsi diantaranya dinas peternakan kabupaten Kampar, badan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan dan dinas perikanan dan kelautan ([www.goriau.com](http://www.goriau.com)).

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, bahwa kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten Kampar belum maksimal dalam pengelolaan keuangan dikarenakan

terbatasnya personel baik kualitas maupun kuantitas ditingkat kabupaten. Selain itu daerah belum mampu untuk menyerap dana pembangunan yang begitu besar Sehingga terjadi penyimpangan dalam APBD Kabupaten Kampar.

Dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah, pemerintah kabupaten Kampar harus menggunakan pendekatan yaitu Partisipasi penyusunan anggaran. Dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran maka aparat pemerintah merasa terlibat dan harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran; Kejelasan sasaran anggaran yang bertujuan untuk menyusun anggaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pemerintah; Akuntabilitas publik dimana kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Mulai pertanggung jawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian dan kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah; dan evaluasi anggaran yang merupakan alat pengendalian terhadap kinerja anggaran. Evaluasi anggaran pada dasarnya membandingkan antara anggaran dengan pelaksanaan sehingga ditentukan penyimpangan yang terjadi. (Istiyani, 2009).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Mbon (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti mengambil 3 (tiga) variabel yaitu partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik

dari Mbon (2014), dan menambah satu variabel baru yaitu evaluasi anggaran yang mengacu pada penelitian Istiyani (2009). Alasan dipilihnya variabel tersebut karena hasil penelitian dari variabel tersebut terhadap kinerja masih menunjukkan hasil yang berbeda. Lalu, penelitian sebelumnya dilakukan pada Kabupaten Manggarai Barat dan di Kota Makasar sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar Riau.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) apakah terdapat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah? 2) apakah terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah? 3) apakah terdapat pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah? 4) apakah terdapat pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah?

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah 1) untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah 2) untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah 3) untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah 4) untuk menguji pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

## **TELAAH PUSTAKA**

### **Partisipasi Penyusunan Anggaran**

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan

yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggung jawaban anggaran mereka (Istiyani, 2009). Sedangkan menurut (Arifin, 2007: 26) partisipasi merupakan penetapan sasaran dengan diskusi yang cukup, yang memungkinkan setiap pelaksana menyadari bahwa sasaran tersebut diterima oleh seluruh anggota dalam organisasi. Partisipasi harus diarahkan agar memberikan kesempatan yang cukup untuk berinteraksi, sehingga semua anggota dalam organisasi dapat bekerjasama dengan baik serta dapat menerima sasaran-sasaran kelompok sebagai sasarannya sendiri

Partisipasi anggaran dan pengukuran kinerja tidak sebatas pada penggunaan anggaran, namun pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek yang dapat memberikan informasi yang efektif dan efisien dalam mencapai hasil yang diinginkan. Aspek - aspek yang dapat memberikan informasi yang efektif dan efisien seperti masukan, kualitas, keluaran, dan hasil. Kinerja aparat pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran

Menurut penelitian Mbon (2014), menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja. Dengan adanya partisipasi oleh pemerintah daerah, maka tersebut berusaha untuk bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya.

Dengan adanya tanggungjawab ini maka akan menjadikan kinerja yang baik bagi organisasi pemerintah, sehingga semakin tingginya partisipasi pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja di satuan kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

### **Kejelasan Sasaran Anggaran**

Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggungjawab. Kejelasan tujuan anggaran berhubungan dengan sejauh mana tujuan-tujuan anggaran dinyatakan secara khusus dan jelas serta dipahami oleh orang-orang yang bertanggung jawab memenuhinya. Dengan adanya kejelasan tujuan, dapat diinformasikan kepada manajer level bawah tentang apa yang diharapkan oleh manajer yang lebih tinggi. Sebaliknya, manajer yang lebih tinggi dapat mempelajari dukungan-dukungan dan persoalan-persoalan manajer di bawahnya melalui laporan-laporan dari bawah (Arifin, 2007 : 26).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penelitian Putra (2013) menyatakan bahwa dengan adanya kejelasan sasaran anggaran mengacu pada anggaran yang telah dibuat dan dapat dimengerti secara jelas dan spesifik sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya berdampak baik terhadap kinerja atau aktivitas

manajerial dari itu sendiri, penelitian tersebut juga didukung oleh mbon (2014) dimana kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>2</sub>: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah

### **Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agen*) untuk memberikana pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Garnita, 2008). Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan sipemberi mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan.

Menurut penelitian nita garnita (2008) menyatakan bahwa dengan adanya penerapan dan pelaksanaan pertanggungjawaban mengenai sumber - sumber dan penggunaan dana, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas kinerja aparat pemerintah akan baik.

Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

H<sub>3</sub>: Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah

### **Evaluasi Anggaran**

Evaluasi anggaran merupakan alat pengendalian terhadap kinerja anggaran. Evaluasi anggaran pada dasarnya membandingkan antara anggaran dengan pelaksanaan sehingga ditentukan penyimpangan yang terjadi, evaluasi anggaran merujuk pada tingkat dimana varian-varian anggaran dilacak kembali ke kepala departemen individu dan digunakan di dalam mengevaluasi kinerja. Evaluasi kinerja yang lebih diprioritaskan pada evaluasi anggaran cenderung mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja para manajer (Ramandei. 2010).

Munawar (2006) menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap perilaku aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dan pada pelaksanaan anggaran, mereka juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga kinerja mereka menjadi lebih baik.

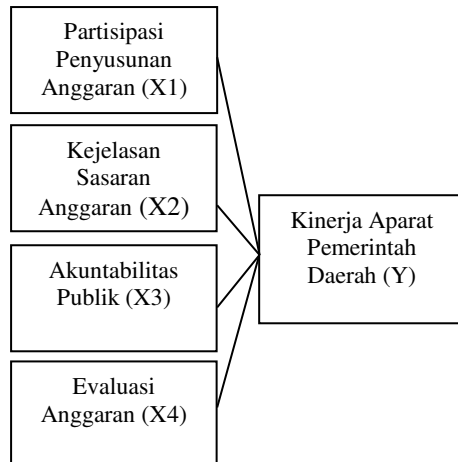
Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>4</sub>: Evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah

### **Model Penelitian**

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan model penelitian sebagai berikut :

**Gambar 1**  
**Model Penelitian**



Sumber : Skripsi dan Jurnal

## METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), yaitu yang berjumlah 32 SKPD yang terdiri dari Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kampar yaitu Dinas dan Badan yang menyusun menggunakan dan melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pelaksana anggaran dari Pemerintah Daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai di Dinas Kabupaten Kampar, yaitu terdiri dari 32 Dinas. Dari setiap SKPD akan diambil 4 responden, sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 128 responden. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dilakukan berdasarkan penentuan kriteria-kriteria yang dibuat oleh peneliti (Sekaran, 2010). Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang memiliki jabatan struktural lapis ketiga (Eselon III) yaitu berfungsi sebagai

penanggung jawab pe-nyusunan dan realisasi yang terdiri dari Kepala Bagian dan Sekertaris Dinas, sedangkan yang memiliki jabatan struktural lapis keempat (Eselon IV) yaitu sebagai penanggung jawab kegiatan yang dioperasionalisasikan dari program yang disusun yang terdiri dari kepala sub bagian dan kepala seksi.

Metode analisis data digunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{KAPD} : \alpha + \beta_1 \text{PPA} + \beta_2 \text{KSA} + \beta_3 \text{AP} + \beta_4 \text{EV} + e$$

Keterangan:

KAPD : Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien Regresi

PPA : Partisipasi Penyusunan Anggaran

KSA : Kejelasan Sasaran Anggaran

AP : Akuntabilitas Publik

EA : Evaluasi Anggaran

e : Error

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

### Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y)

Kinerja Pemerintah adalah suatu system yang bertujuan untuk membantu pimpinan dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. (Istiyani, 2009)

Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 12 pertanyaan dengan menggunakan skala *likert* Di adopsi dari (Istiyani, 2009) dimulai dengan

(1) “Sangat Tidak setuju (STS)”, (2) “Tidak Setuju (TS)”, (3) “Netral (N)”, (4) “Setuju (S)”, (5) “Sangat Setuju (SS)”.

#### **Partisipasi Penyusunan Anggaran (X<sub>1</sub>)**

Partisipasi penyusunan anggaran (budgetary participation) merupakan tingkat keterlibatan manajer dalam penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran diukur dalam penelitian (Indriani, 2008). Variabel ini memiliki 5 item pertanyaan pengukurannya menggunakan *skala Likert* dimulai dengan (1) “Sangat Tidak Setuju (STS)”, (2) “Tidak Setuju (TS)”, (3) “Netral (N)”, (4) “Setuju (S)”, (5) “Sangat Setuju (SS)”.

#### **Kejelasan Sasaran Anggaran (X<sub>2</sub>)**

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab (Bangun, 2009).

Variabel ini memiliki 5 item pertanyaan. Pengukurannya diukur dengan *Skala Likert* dimulai dengan (1) “Sangat Tidak Setuju (STS)”, (2) “Tidak Setuju (TS)”, (3) “Netral (N)”, (4) “Setuju (S)”, (5) “Sangat Setuju (SS)”.

#### **Akuntabilitas Publik (X<sub>3</sub>)**

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk

meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006).

Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner dengan 9 pertanyaan dan penggunaan skala *likert*. (1) “Sangat Tidak Setuju (STS)”, (2) “Tidak Setuju (TS)”, (3) “Netral (N)”, (4) “Setuju (S)”, (5) “Sangat Setuju (SS)”.

#### **Evaluasi Anggaran (X<sub>4</sub>)**

Evaluasi Anggaran didefinisikan sejauh mana selisih anggaran program dan kegiatan SKPD ditelusur oleh pimpinan ke masing-masing bawahan dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja bawahan dalam penyusunan dan penggunaan anggaran (Istiyani, 2009).

Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner dengan 7 pertanyaan dan penggunaan skala *likert*. (1) “Sangat Tidak Setuju (STS)”, (2) “Tidak Setuju (TS)”, (3) “Netral (N)”, (4) “Setuju (S)”, (5) “Sangat Setuju (SS)”.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Kuesioner dan Demografi**

Jumlah kuesioner yang disebar sejumlah 128 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar peneliti, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 116 (91%). Tingginya tingkat pengembalian (*respon rate*) sebesar 91% tersebut, dikarenakan kuesioner disebar langsung kepada responden di SKPD Kabupaten Kampar. Jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 116 kuesioner atau (100%). Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan secara langsung kepada

pegawai yang bekerja di satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai 17 Juni 2015.

Responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 75 responden atau 64,6% dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 41 responden atau 35,3%. Dilihat dari karakteristik Jumlah responden jabatan Bendahara 7 pegawai (6%), Kepala Sub Bagian 54 pegawai (46,5%), Kepala bidang 12 pegawai (10,3%), Sekretaris 20 pegawai (17,2%), Kepala seksi 16 pegawai (13,8%), Kepala Dinas 7 pegawai (6%).

Dilihat dari lama bekerja, responden yang lama bekerjanya 1-9 tahun sebanyak 10 responden atau (8,6%), 10-18 tahun sebanyak 52 responden atau (44,8%), 19-27 tahun sebanyak 44 responden atau (37,9%), dan 28-36 tahun sebanyak 10 responden atau (8,6%).

Dilihat dari karkteristik pendidikan, responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan tingkat pendidikan strata satu (S1) sebanyak 71 pegawai (64,6%), Kemudian diikuti oleh responden dengan latar belakang pendidikan strata dua (S2) 36 pegawai (31%), dan yang paling sedikit adalah responden dengan tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 5 pegawai (4,3%).

### Hasil Uji Validitas Data

Pada penelitian ini jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 116 responden. Penelitian ini untuk mengukur atau menentukan valid atau tidaknya pertanyaan ini. Masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan

hasil yang signifikan dengan tingkat signifikansinya 5%  $df = n-2$  ( $116-2$ ) = 114  $r_{tabel} = 0,182$ . Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS 20.0, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah valid ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ).

### Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS 20.0. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai koefisien *Alpha* lebih besar daripada 0,6 (Ghozali, 2009). Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6 maka nilainya kurang baik. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan tidak reliabel.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Kritis
Partisipasi Penyusunan Anggaran ( $X_1$ )	0,865	0,6
Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_2$ )	0,656	0,6
Akuntabilitas Publik ( $X_3$ )	0,729	0,6
Evaluasi Anggaran ( $X_4$ )	0,672	0,6
Kinerja Aparat Pemerintah Daerah ( $Y$ )	0,601	0,6

Sumber : Data Olahan, 2015

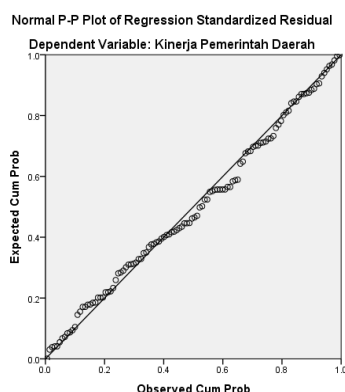
Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah reliabel (*cronbach's alpha* > 0,6 ).



### Hasil Uji Normalitas Data

Untuk mengolah data digunakan Uji Normalitas, yang menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitian ini menggunakan *Normal Probability Plot* untuk menguji data yang mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik (Ghozali, 2011:60).

**Gambar 2**  
**Grafik Normal P-Plot**



Sumber : Data Olahan, 2015

Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal artinya model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya

korelasi antar variabel bebas penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat besaran VIF (*Varian Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance*. Jika nilai VIF < 10 atau nilai *Tolerance* > 0.10, berarti tidak terdapat multikolinearitas (Suharyadi dan Purwanto, 2011:230).

**Tabel 2**  
**Nilai *Tolerance* dan VIF**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Partisipasi Penyusunan Anggaran	.996	1.004
Kejelasan sasaran anggaran	.995	1.005
Akuntabilitas publik	.934	1.070
Evaluasi anggaran	.935	1.069

Sumber : Data Olahan, 2015

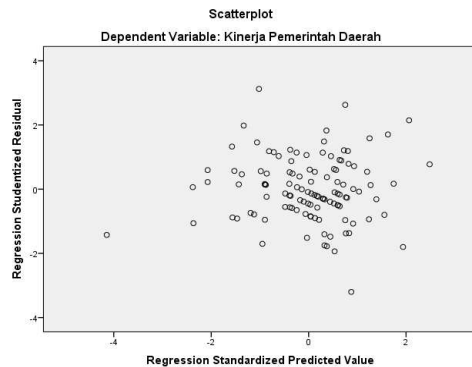
Dalam penelitian ini tidak terdapat multikolineritas (nilai VIF < 10 untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance* > 0,10).

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serat

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

**Gambar 3**  
**Grafik Scatterplot**



Sumber : Data Olahan, 2015

Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

### Hasil Uji Autokorelasi

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode ke t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi gejala autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Durbin-Watson	N
1,744	116

Sumber : Data Olahan, 2015

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai dhitung (Durbin Watson) adalah sebesar 1.744, yang terletak antara -2 dan 2. Sehingga dapat disimpulkan, tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian.

### Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dilakukan dengan bantuan *software SPSS (statistical product and service solution)* versi 20.0.

### Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	19.036	3.985	4.776	.000
Partisipasi Penyusunan Anggaran	.216	.080	2.687	.008
Kejelasan Sasaran Anggaran	.443	.121	3.676	.000
Akuntabilitas publik	.149	.068	2.176	.032
Evaluasi Anggaran	.285	.066	4.343	.000

Sumber : Data Olahan, 2015

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi linear berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut.

$$Y = 19.036 + 0,216X_1 + 0,443X_2 + 0,149X_3 + 0,285X_4 + e$$

**Tabel 5**  
**Hasil Pengujian Hipotesis dan**  
**Pembahasan**

Hipotesis	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Signifikan	Alpha ( $\alpha$ )
H <sub>1</sub>	2,687	1,982	0,008	0,05
H <sub>2</sub>	3,676	1,982	0,000	0,05
H <sub>3</sub>	2,176	1,982	0,032	0,05
H <sub>4</sub>	4,343	1,982	0,000	0,05

Sumber : Data Olahan, 2015

#### **Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah**

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,687 > 1,982$  dan  $\text{sig.t } (0.008) < \text{tingkat kesalahan } (\alpha) 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu Partisipasi Penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Wilmanzah (2014), Andriani (2008) dan Mbon (2014), yang mengemukakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja Aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran maka kinerja aparat pemerintah daerah semakin baik karena dapat mencapai suatu tujuan organisasi dalam berpartisipasi.

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan Anggraeni (2009), yang mengatakan bahwa Partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja

aparat pemerintah daerah. Ketidak konsistenan penelitian Anggraeni (2009), dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang berbeda serta perbedaan tempat penelitian.

#### **Pengaruh Kejelasan Sasaran anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah**

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $3,676 > 1,982$  dan  $\text{sig.t } 0,000 < \text{tingkat kesalahan } (\alpha) 0,05$ . Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Aparat pemerintah daerah signifikan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Abdullah (2004) yang mengemukakan bahwa kejelasan sasaran anggaran kinerja aparat pemerintah daerah, dimana dengan adanya suatu kejelasan dalam sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah untuk pelaksanaan dalam suatu pekerjaan di dalam kinerja aparat pemerintah daerah.

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adoe (2002) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, dimana dengan adanya sasaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, tekanan dan ketidak puasan dari pegawai sehingga tidak mencapai kinerja yang diharapkan penelitian Adoe (2002) dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang berbeda serta perbedaan tempat penelitian.

### **Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah**

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,176 < 1,982 \text{ sig.} t \text{ } 0,032 >$  tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparat pemerintah daerah

Hasil pengujian penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013) dan didukung oleh Mbon (2014) yang menyatakan bahwa dengan adanya akuntabilitas publik yang baik mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah, dengan kata lain dengan adanya akuntabilitas publik, maka aparat pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja aparat pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal, dengan demikian akuntabilitas dapat mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah.

### **Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah**

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $4,343 < 1,982 \text{ sig.} t \text{ } 0,000 >$  tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu Evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparat pemerintah daerah.

Hasil pengujian penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Salbiah dan Ridha Rizky (2012) yang menyatakan bahwa dengan adanya evaluasi

anggaran yang baik akan meningkatkan suatu kinerja, dengan menggunakan Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan dari proses maupun hasil akhir dari kegiatan yang telah dilakukan, yang berguna melakukan untuk perubahan atau perbaikan pada kegiatan berikutnya. Pada dasarnya evaluasi berfungsi sebagai alat control dalam upaya untuk mencapai tujuan dari suatu tindakan. Namun, selain fungsi tersebut, evaluasi juga memiliki tiga fungsi utama dalam menganalisis kebijakan. Evaluasi anggaran merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja aparat pemerintahan.

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Istiyani (2009) yang menyatakan bahwa Evaluasi Anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, dalam penelitian Istiyani (2009) dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang berbeda serta perbedaan tempat penelitian.

### **Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**(Adjusted R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.560 <sup>a</sup>	.313	.288

Sumber : Data Olahan, 2015

Berdasarkan tabel yang di atas, diperoleh nilai R sebesar 0,560 atau 56% dan R Square (R<sup>2</sup>) sebesar 0,313 atau 31,3%. Koefisien determinasi atau Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,288 memberi penjelasan bahwa 28,8% Kinerja aparat pemerintah daerah dipengaruhi partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, dan evaluasi anggaran. sedangkan 71,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dari presentase tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat faktor individual lain sebesar 71,2% yang dapat dijelaskan oleh variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Variabel partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di kabupaten kampar. Hal ini dikarenakan anggaran dapat dinilai mempunyai konsekuensi terhadap sikap dan perilaku individu atau kelompok.
2. Variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di kabupaten kampar. Hal ini dapat dikarenakan suatu anggaran

dapat ditetapkan secara jelas dengan tujuan anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggungjawab atas pencapaian suatu sasaran anggaran.

3. Variabel akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten Kampar. Hal ini dikarenakan pihak pihak yang bersangkutan dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan.
4. Variabel evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten Kampar. Hal ini dikarenakan evaluasi anggaran dapat mencapai tingkat rata rata yang baik dalam suatu kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten Kampar.

### Saran

Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas daerah penelitian seperti Kabupaten atau lingkup Provinsi. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan akurasi hasil yang diperoleh dimasa yang akan datang dapat lebih sempurna dari penelitian ini.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambahkan variabel lain yang juga menjelaskan kinerja aparat pemerintah daerah seperti sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan fungsional dan transparansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. 2008. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis
- Andriani, Rina. 2008. *Pengaruh budgetary goal characteristics terhadap kinerja pemerintah daerah dengan budaya organisasi sebagai moderating variable*. Skripsi Universitas Riau
- Anggraeni, rafika. 2009. *Pengaruh Partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja Skpd Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu*. Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Astuti, Ratih Muji. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bangun, Andrian. 2009. *Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan strktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD dengan pengawasan internal sebagai pemoderasi pada Kabupaten Deli Serdang*
- Bastian, Indra. 2005. *Sistem dan penganggaran pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta, Salemba empat
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Garnita, Nita. 2008. *Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Instansi pemerintah*. Skripsi Universitas Widyatama
- Hansel dan Mowen. 2001. *Akuntansi Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta.
- Irfan. 2013. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah : Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi Sebagai variabel Moderating (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Meranti)*. Skripsi Universitas Riau
- Istiyani, 2009. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah*. Skripsi Universitas Sebelas Maret
- Mardiasmo, 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Keempat. Andi, Yogyakarta
- Mbon, Fladimir Edwin. 2014. *Pengaruh Partisipasi*

- Penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik terhadap aparat pemerintah daerah.* Skripsi Universitas Atma jaya Yogyakarta
- Nuriani. 2014. *Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah melalui komitmen organisasi dan persepsi inovasi sebagai variabel intervening.* Skripsi Universitas Riau
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah
- Putra, Deki. 2013. *Pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.* Skripsi Universitas Negeri Padang
- Ramandei, Pilipus. (2010). *Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura).* Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
- Salbiah, Rizky Ridha. 2012. *Pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (skpd) pemerintah provinsi sumatera utara.* Jurnal Fakultas ekonomi universitas sumatera utara
- Sari, Desak Putu Intan Permata. 2014. *Pengaruh akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.* Jurnal Universitas pendidikan Ganesha Singaraja
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business.* Jakarta: Salemba Empat
- Wulandari, Nur Endah. 2011. *Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kepuasan kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating.* Skripsi Universitas Diponegoro
- [www.kamparkab.go.id](http://www.kamparkab.go.id)
- [www.bpkriau.go.id](http://www.bpkriau.go.id)
- [www.goriau.com](http://www.goriau.com)